

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

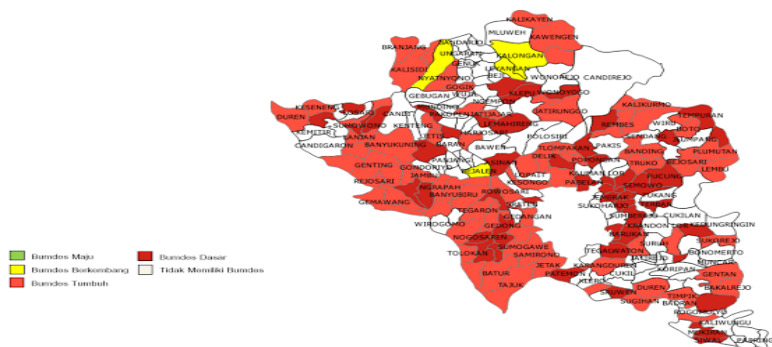
Untuk meningkatkan potensi desa agar lebih mandiri dalam mengelola sumber daya keuangan, pemerintah mendorong upaya swadaya tersebut melalui pembentukan badan usaha yang dikelola masyarakat. Untuk mendukung upaya tersebut, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 6 (UU Desa) pada tahun 2014 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tentang Badan Usaha Desa (Bumdes) pada tahun 2010.

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah lembaga/badan ekonomi desa yang dibentuk dan dimiliki oleh pemerintah desa sebagai badan hukum, dikelola secara mandiri secara ekonomi dan profesional, dengan seluruh atau sebagian besar modalnya merupakan kekayaan desa yang terpisah (Dewi, 2014). Sebagai unit usaha BUMDes harus mendapatkan keuntungan dari pengoperasian usahanya, namun tetap harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan BUMDes tidak hanya diukur dari keuntungannya saja, tetapi juga manfaatnya bagi kehidupan masyarakat. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 43, modal BUMDes terdiri dari bagian modal desa dan bagian modal masyarakat desa, bagian modal desa berasal dari APB Desa serta sumber lainnya. Kontribusi modal APB berasal dari dana baru, dukungan pemerintah, pemerintah daerah dan properti desa yang diserahkan ke APB. Selain itu, perlu juga diingat bahwa Bumdes bukanlah bagian dari pemerintahan desa, dimana BUMDes ini merupakan entitas yang berbeda. Kedudukan Bumdes sama dengan unit usaha lainnya, seperti perusahaan yang dikuasai swasta yang melayani kesejahteraan masyarakat desa (Bumdes.ID, 2017).

Dalam rangka pendirian Badan Usaha Desa (BUMDes) tahun 2014 berdasarkan Pasal 87 (1) Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa, secara umum dapat dikatakan bahwa BUMDes adalah badan yang diberdayakan untuk memaksimalkan potensi ekonomi, fasilitas ekonomi, sumber daya alam

dan manusia. Sumber daya BUMDes memiliki potensi risiko kegagalan yang akan terwujud dalam hal pencapaian tujuan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor.18/POJK.03/2016 pasal 1 ayat 3 mengungkapkan bahwa risiko merupakan potensi kerugian akibat adanya peristiwa tertentu (Fajar & Rusmana, 2018). Untuk mengantisipasi potensi risiko, BUMDes harus menerapkan sistem pengendalian internal yang efektif dan komprehensif.

BUMDesma memerlukan pengendalian intern dalam pelaksanaan sistem akuntansinya, dalam hal sistem informasi akuntansi penjualan. Menurut Hery (2013) pengertian pengendalian internal adalah seperangkat kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk melindungi kekayaan perusahaan dari penyalahgunaan, memastikan ketersediaan informasi akuntansi perusahaan yang akurat, dan memastikan bahwa semua persyaratan hukum (peraturan) dan prinsip-prinsip manajemen telah diikuti atau dilaksanakan. sebagaimana mestinya, semua karyawan perusahaan. Berikut merupakan hasil yang didapatkan peneliti dari data pemetaan desa berdasarkan keberadaan bumdes yang ada diwilayah kabupaten semarang :



Gambar 1.1 Data Pemetaan Desa Berdasarkan Keberadaan BUMDes yang Ada diwilayah Kabupaten Semarang

Sumber : Dokumen TKPK Prov. Jateng, 2020

Dari Gambar 1.1 data desa berdasarkan keberadaan BUMDes diwilayah Kabupaten Semarang dapat dilihat bahwa :

1. Jumlah Desa Tumbuh : 62 Desa
2. Jumlah Desa Dasar : 43 Desa

3. Jumlah Desa Berkembang : 4 Desa
4. Jumlah BUMDes : 109 Bumdes

Fenomena pengendalian intern BUMDes. Unit usaha BUMDes memerlukan pengendalian intern yang baik untuk mencegah terjadinya resiko yang muncul. Hal ini berkaitan dengan pendirian BUMDes dan memiliki tujuan meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa untuk kepentingan kesejahteraan desa, memperkuat usaha masyarakat dalam mengelola potensi ekonomi desa, mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa dan/atau pihak ketiga, menciptakan peluang dan jaringan pasar untuk mendukung pelayanan publik, meningkatkan jumlah penduduk., membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pelayanan publik, menumbuhkan dan meratakan perekonomian desa, serta meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa. Oleh karena itu, BUMDes harus memiliki modal yang cukup.

Fenomena terkait BUMDes dapat melanjutkan pertumbuhan ekonomi kota. Sebagai satu-satunya badan hukum publik di desa, BUMDes dapat menjaga dan melaksanakan pertumbuhan ekonomi desa yang berkeadilan, meningkatkan semangat berdirinya BUMDes dan kebijakan peningkatan kualitas BUMDes. Apalagi setelah UU Pengadaan Tenaga Kerja 11/2020 memperkuat status hukum BUMDes sebagai badan hukum termuda di bawah hukum publik. Sebanyak Rp 867,66 miliar dari jumlah APBDDes 2022 dialokasikan untuk pendirian dan modal BUMDes. Hal ini menunjukkan bahwa peran BUMDes di desa semakin meningkat. PP 11/2021 memberikan mekanisme untuk memulihkan BUMDes, baik melalui pergantian pengurus, penambahan modal awal maupun pergantian unit usaha.

Karena fenomena yang ada, BUMDes dapat melanjutkan pertumbuhan ekonomi desa, dimana banyak desa yang mulai mendirikan BUMDes sebagai salah satu langkah berkembangnya ekonomi desa, dalam bentuk unit-unit usaha. Dalam membangun lini bisnis BUMDes ini perlu diperhatikan agar pengendalian intern berjalan dengan baik dan tidak terjerumus pada

kecurangan. Mempertimbangkan lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, tindak lanjut dan komunikasi.

BUMDesma Kecamatan Kaliwungu ,Kab.Semarang Prov Jawa Tengah tepatnya pada JL. Raya Ampel – Simo, Canggal, Kaliwungu, Kec. Kaliwungu, Kabupaten Semarang. Toko ini mendirikan tempat berbelanja nyaman dan lengkap dengan waktu operasi setiap senin - sabtu dari pukul 08.00 WIB - 20.30 WIB. Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, masyarakat harus menempuh jarak yang cukup jauh. Yang terletak di dekat kota Boyolali. Omset yang dihasilkan dalam sehari pada penjualan di Toko BUMDesma yaitu Rp. 14.000.000 – Rp. 15.000.000.

Pada Toko BUMDesma ini aktivitas pengendalian khususnya pada pemisahan tugas masih kurang memadai karena adanya rangkap Jobdesk pada stafnya, sehingga rawan terjadinya ketidakefisienan serta ketidakefektifannya sangat tinggi. Toko BUMDesma tersebut tidak hanya memerlukan adanya SIA yang memadai namun juga membenahan sistem akuntansi serta membenahan struktur organisasi supaya tidak lagi tumpang tindih tugas serta kompeten terhadap bidangnya. Pada stock opname yang ada di Toko BUMDesma dilakukan bulanan akan tetapi hanya beberapa barang saja yang mengakibatkan barang yang ada di toko dengan stok Gudang terjadi selisih sehingga mengakibatkan kerancuan dalam melakukan pembuatan laporan keuangan. Dan juga belum tersedianya kartu stok opname yang bertujuan untuk mencatat stok barang yang masih tersedia untuk memudahkan dalam melakukan pengecekan barang.

Sistem informasi akuntansi adalah komponen yang mengumpulkan, mengklasifikasikan, memproses, menganalisis, dan menggabungkan informasi keuangan yang relevan untuk pengambilan keputusan dari pihak eksternal (seperti pemerintah, masyarakat, investor dan kreditur) dan pihak internal (terutama manajemen). Penjualan merupakan salah satu sumber pendapatan bagi perusahaan. Penjualan yang berhasil adalah penjualan yang dapat menguasai pangsa pasar. Dengan meningkatnya penjualan maka keuntungan perusahaan meningkat dan perusahaan dapat terus bertahan.

Sistem pengendalian intern diperlukan sebagai strategi untuk mendukung sistem informasi akuntansi yang baik (Irawati & Satri, 2017). Pengendalian internal adalah suatu proses, yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi, yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai tujuan tertentu. Pengendalian internal berfungsi untuk mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumber daya suatu organisasi (Hamel, 2013). Selain itu, tugas pengendalian internal adalah meminimalkan atau mencegah kecurangan. Penipuan disebabkan oleh kurangnya kontrol atas penyimpangan buatan manusia yang dapat mengakibatkan perusahaan merugi. Hal ini menjadi salah satu faktor perusahaan dalam memantau operasional yang sedang berjalan (Irawati & Satri, 2017).

Mulyadi (2016) menemukan bahwa sistem pengendalian internal terdiri dari struktur, organisasi, metode dan prosedur yang diatur untuk melindungi aset organisasi, untuk mengontrol keakuratan dan keandalan informasi akuntansi, dan untuk mempromosikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip manajemen. Keberlangsungan dan kekuatan sistem pengendalian intern yang ditetapkan oleh organisasi harus didukung oleh seluruh anggota organisasi agar seluruh entitas dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan pengendalian yang baik (Irustami, Sinarti, & Olivia, 2018). Konsep pengendalian internal dikemukakan oleh Commission of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) dan terdiri dari 5 (lima) bagian yaitu: Lingkungan pengendalian, penilaian risiko, tindakan pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan. Penerapan 5 (lima) komponen tersebut akan membantu perusahaan mencapai pengendalian internal yang efektif (Wahyu, Marliyati, & I.Nyoman, 2019). COSO menekankan bahwa pengendalian internal adalah alat untuk mencapai tujuan tertentu, bukan tujuan itu sendiri. Sebuah organisasi dapat mencapai pengendalian internal ketika tidak hanya memiliki kebijakan, tetapi juga perilaku setiap orang dalam organisasi (Pitaloka, et al., 2020).

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hendra Setiaan, Aang Munawar, & Soerta Laura (2015) menunjukkan bahwa sistem informasi

akuntansi yang berada pada PT. Indomilk sudah baik karena didukung pengendalian internal yang baik. Dapat dilihat dengan adanya software akuntansi yang berfungsi untuk mengurangi resiko kesalahan dalam setiap pencatatan. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Nasrani Abba Tampubolon & Firdaus Hamta (2017) menunjukkan bahwa penerapan sistem dan prosedur akuntansi penjualan tunai dan pengendalian internal yang ada pada PT. Kita Jaya Sukses Batam sudah dijalankan cukup baik karena adanya pemisahan fungsi, otorisasi persetujuan, penambahan fungsi, dan struktur pengendalian internal. Namun hal ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Delin Tri Resti Misra Aini (2020) yang menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi yang dilakukan CV. Surya Kuansing belum sepenuhnya sesuai menunjang efektivitas pengendalian internal. Karena ada beberapa kekurangan seperti tidak lengkapnya catatan akuntansi dan prosedur penjualan.

Berdasarkan penelitian ini, peneliti bertujuan untuk menganalisis suatu siklus penjualan, sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal yang digunakan oleh Toko BUMDesma Manunggal Kaliwungu dalam menjalankan usahanya, apabila toko tersebut merupakan salah satu unit usaha yang bergerak dibidang usaha dagang. Oleh karena itu dalam penelitian ini, peneliti mengambil judul **“Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Dalam Meningkatkan Pengendalian Internal Pada Toko BUMDesma Manunggal Kaliwungu”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, Bahwa SIA mempunyai peran yang sangat penting saat operasional perusahaan serta pengembangan suatu usaha. Maka peneliti menyusun suatu rumusan masalah yaitu : Bagaimana analisis sistem informasi akuntansi penjualan dalam meningkatkan pengendalian internal pada toko BUMDesma Manunggal Kaliwungu ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah hal pokok yang harus ada dan diterapkan terlebih dahulu dalam setiap penelitian agar permasalahan yang

diangkat dapat diselesaikan dengan baik, dan tidak keluar dari pokok permasalahan yang dibahas.

1. Untuk menganalisis siklus penjualan yang ada di toko BUMDesma Manunggal Kaliwungu.
2. Untuk menganalisis implementasi pengendalian internal yang ada pada Toko BUMDesma Manunggal Kaliwungu.
3. Untuk menganalisis implementasi sistem informasi akuntansi penjualan yang diterapkan oleh Toko BUMDesma Manunggal Kaliwungu

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan, maka manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Menambah wawasan analisis perkembangan ilmu akuntansi untuk memahami penilaian pengendalian intern khususnya dalam penjualan dan penerapan ilmu khususnya dalam sistem informasi akuntansi, siklus penjualan dan pengendalian intern yang terjadi dalam pekerjaan nyata sebuah perusahaan komersial . atau perusahaan selama penelitian.

2. Bagi Toko BUMDesma Manunggal Kaliwungu

Diharapkan dapat memberikan masukan untuk pengembangan ke depan dan perusahaan ritel bersaing dengan supermarket lain untuk mendapatkan keuntungan dari sistem dan proses untuk memahami pengendalian internal, khususnya siklus penjualan.

3. Bagi Universitas Ngudi Waluyo

Sebagai referensi bagi mahasiswa dan dapat menambah referensi Perpustakaan Universitas Ngudi Waluyo serta menambah informasi untuk menyelesaikan tugas akhir terkait sistem informasi akuntansi dan pengendalian intern khususnya penjual.

